



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

ALAMAT : REKTORAT KAMPUS GUNUNG KELUA KOTAK POS 1068 TELP. 41118 FAX. 32870 SAMARINDA 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 228 /E/1998

Tentang

PANITIA SEMINAR PEMULIHAN KONDISI KEHIDUPAN NASIONAL
DALAM RANGKA PENGKAJIAN DAERAH DAN PENGUMPULAN BAHAN/MATERI GBHN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan seminar dengan tema "Pengembangan Aspirasi Daerah dalam Rangka Ketahanan Nasional" yang bertujuan untuk menghimpun berbagai masukan dan aspirasi daerah, dalam penyusunan materi GBHN yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat untuk mewujudkan kehidupan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya dalam rangka pencapaian cita-cita dan tujuan nasional, maka dipandang perlu dibentuk panitia pelaksana seminar ;
- b. bahwa berhubung dengan butir a di atas perlu diterbitkan surat keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 ;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;
4. Keputusan Mendikbud RI. :
a. Nomor 0448/O/1992 ;
b. Nomor 0177/O/1995.
- Memperhatikan : Kerangka acuan penyelenggaraan seminar dari Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Panitia pelaksana seminar Pemulihan Kondisi Kehidupan Nasional Dalam Rangka Pengkajian Daerah dan Pengumpulan Bahan/Materi GBHN adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Panitia dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor.
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Universitas Mulawarman.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tempat : Samarinda
Tanggal : 31 Desember 1998

Rachmad Hernadi, M.Sc.
341 452

- SALINAN disampaikan kepada Yth.
1. Mendikbud RI di Jakarta ;
 2. Sesjen Dephankam di Jakarta ;
 3. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
 4. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
 5. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
 6. Gubernur KDH Tk.I Kaltim ;
 7. Semua Unit di lingkungan Unmul.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : 228 /E/1998 tanggal 31 Desember 1998
Tentang Panitia Seminar Pmulihan Kondisi Kehidupan Nasional
Dalam Rangka Pengkajian Daerah dan Pengumpulan Bahan/Materi
GBHN.

Penanggung Jawab : Rektor Universitas Mulawarman
Ketua : Prof.Dr.Ir. Riyanto, M.Sc
Wakil Ketua : Sarosa Hamongpranoto, SH
Sekretaris : Drs. Adam Idris, M.Si
Sekretariat : 1. Malik
2. Kasidi
3. Syahrani Syata

Bidang Reformasi : 1. Drs. H. Anwar Basran
2. Dr. M. Jafar Haruna, MS
3. Drs. Noorsyansu Agang, SU

Bidang Otonomi Daerah : 1. Drs. H. Arifin Leo
2. Drs. Abdullah
3. Drs. Suarta Jaya, MS

Bidang Aspirasi Daerah yang perlu diangkat : 1. Drs. G. Simon Devung, M.Pd, M.Si
2. Drs. M. Jamal, M.Si

Bidang Kinerja Pemerintahan : 1. Drs. DB. Paranoan, M.Si
2. Drs. Abdullah Karim, MS

Bidang Masukan Penyusunan GBHN : 1. Prof. H.A. Waris, SE
2. Drs. Hadaitullah
3. Prof.Dr.Ir.A.Arifien B, M.Agr

Ditetapkan di : Samarinda
Tanggal : 31 Desember 1998



Rachmad Hernadi, M.Sc
41 452

**KERANGKA ACUAN PENYELENGGARAAN SEMINAR
TENTANG
“PEMULIHAN KONDISI KEHIDUPAN NASIONAL”
(DALAM RANGKA PENGKAJIAN DAERAH
DAN PENGUMPULAN BAHAN /MATERI GBHN)**

1. Latar Belakang

Aspirasi reformasi nasional menyusul terjadinya berbagai krisis nasional dengan berbagai latar belakangnya, menuntut adanya berbagai perubahan dan pembaharuan, termasuk yang dikembangkan sebagai bahan/materi GBHN. Rangkaian agenda reformasi yang ditetapkan pemerintah pasca Orde Baru antara lain pelaksanaan Sidang Istimewa MPR, penyelenggaraan Pemilu 1999 dan Sidang Umum MPR hasil Pemilu, membawa konsekuensi logis diperlukannya upaya instropeksi, evaluasi dan reorientasi yang mendalam, obyektif dan sungguh-sungguh untuk dituangkan dalam bentuk GBHN yang benar-benar memenuhi tuntutan reformasi.

GBHN harus benar-benar mencerminkan kehendak rakyat untuk mewujudkan kehidupan manusia Indonesia yang seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya, dalam rangka pencapaian cita-cita dan tujuan nasional. Sebagai pedoman utama dalam bentuk garis-garis besar bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional yang berasal dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat dan hasilnya ditujukan untuk rakyat, maka penyusunan materi GBHN harus bertolak dari pelembagaan aspirasi dan kehendak partisipasi masyarakat, baik secara kewilayahan, kedaerahan maupun secara nasional. Dengan demikian diharapkan proses penyusunan bahan/materi GBHN dapat merangkum segenap aspirasi rakyat yang mendasar serta sejalan dengan tuntutan yang mengemuka, melalui pelibatan seluruh potensi masyarakat terutama para pakar, cendikiawan, praktisi, tokoh masyarakat, termasuk para birokrat (jalur empirik, akademik, aspiratif).

Reformasi pada dasarnya bertujuan untuk lebih menata kembali kondisi dan tata kehidupan nasional, agar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menjadi semakin demokratis, menjunjung tinggi hak asasi manusia, hukum dan keadilan sosial, termasuk dalam hal pengembangan otonomi daerah yang lebih luas; sehingga akan semakin mampu mengakomodasikan kehendak rakyat banyak sekaligus mengantisipasi berbagai tuntutan sejalan dengan perkembangan jaman, namun tetap dengan mewaspadaikan berbagai kemungkinan yang justru dapat merawankan kondisi kehidupan nasional itu sendiri dalam lingkup Ketahanan Nasional. Secara lebih sederhana reformasi lebih diartikan sebagai upaya pembaharuan, suatu rangkaian upaya transformasi yang menghendaki terwujudnya tatanan kehidupan atau pemulihan kondisi kehidupan nasional yang lebih baik.

Sejalan dengan hal itu upaya untuk mencermati dan mengukur kinerja pemerintahan Orde Baru yang selama ini sering disoroti, kiranya akan merupakan salah satu acuan yang perlu dikaji, terutama tentang sisi keberhasilan maupun kegagalannya, kelebihan maupun kekurangannya, kekuatan maupun kelemahannya. Dengan demikian hal-hal yang bersifat negatif dapat dijadikan pelajaran yang berharga untuk tidak terulang, sedangkan hal-hal yang bernilai positif dapat dijadikan acuan untuk dikembangkan sejalan dengan perkembangan lingkungan strategis.

Untuk lebih memperkuat daya kohesi dan integritas nasional, berbagai aspirasi yang berkembang di daerah yang memang memerlukan fasilitas pemerintah pusat maupun yang berdampak strategis bagi pemertapan kondisi kehidupan nasional, perlu diangkat secara lugas untuk dapat tertangani secara proporsional. Masukan dari masyarakat dan pemerintah daerah yang didukung oleh berbagai pengalaman empirik, tuntutan dan kehendak masyarakat yang aspiratif serta pemikiran kalangan perguruan tinggi yang didukung pengetahuan akademik, kiranya akan dapat dirangkum dalam/melalui suatu seminar atau pertemuan ilmiah yang diselenggarakan di daerah dalam bentuk kajian daerah.

2. Tujuan Seminar

Menghimpun berbagai masukan dan aspirasi daerah, termasuk masalah otonomi daerah yang diharapkan serta evaluasi kinerja pemerintahan pusat (selama masa Orde Baru dan Pasca Orde Baru), untuk diangkat sebagai bahan masukan bagi pemulihan kondisi kehidupan nasional dalam rangka reformasi nasional, sejalan dengan kepentingan daerah dan kepentingan nasional.

3. Tema Seminar : "Pengembangan Aspirasi Daerah dalam Rangka Ketahanan Nasional.

4. Ruang Lingkup Seminar antara lain :

- a. Masalah Reformasi (menurut tinjauan daerah).
- b. Masalah Otonomi Daerah.
- c. Aspirasi daerah yang perlu diangkat.
- d. Kinerja Pemerintahan (Masa Orde Baru dan Pasca Orde Baru)
- e. Bahan masukan bagi penyusunan GBHN dan lain-lain.

5. Penyelenggaraan Seminar

- a. Dilaksanakan di daerah oleh Perguruan Tinggi setempat, dengan dukungan Pemerintah Daerah (bersifat koordinatif).
- b. Sebagai bagian dari realisasi Kerjasama dengan Setjen Wanhankamnas dalam lingkup Kajian Daerah sesuai kesepakatan bersama.
- c. Ketentuan lain seperti waktu, tempat dan pelaksanaan Seminar, diserahkan sepenuhnya pada Perguruan Tinggi/Universitas penyelenggara.

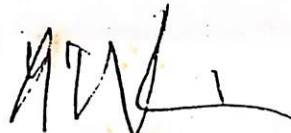
- d. Pada waktu pelaksanaan seminar Setjen Wanhankamnas akan mengirimkan perwakilan/Staf yang ditunjuk.
- e. Peserta Seminar diharapkan terdiri dari Kalangan Perguruan Tinggi/Cendekiawan, Unsur Pemda/Birokrat, Para Pakar/Tokoh Masyarakat/LSM (Jalur Aspiratif), dan lain-lain.
- f. Hasil Seminar akan diperlakukan sesuai isi kesepakatan Kerjasama dengan Setjen Wanhankamnas.

6. Lain-lain

Hal-hal yang belum tercakup dalam Kerangka Acuan ini akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Setjen Wanhankamnas dan pihak lain terkait sesuai kepentingan.

Jakarta, 15 Desember 1998

An SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERTAHANAN KEAMANAN NASIONAL
DEPUTI PENELITIAN DAN PENGAJIAN



SYAMSUL HUDA
MAYOR JENDERAL TNI